

KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK DAN UPAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK

*Dewi Ratnasari, Siswandari, Elvia Ivada

*Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 57126, Indonesia
dewiratnasari02290@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala pemungutan pajak kabupaten atau kota dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di kota Surakarta sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah perpajakan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan lebih ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) sistem pemungutan pajak daerah di kota Surakarta menggunakan *Self Assesment System* dan menggunakan *Office Assesment System*. (2) kendala dalam pemungutan pajak daerah yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. (3) upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan cara melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada wajib pajak dan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengundang wajib pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait dengan pajak daerah. (4) materi bahan ajar tentang upaya dan kendala belum ada dalam mata kuliah perpajakan yang diajarkan di Prodi Pendidikan Akuntansi.

Kata Kunci : *Kendala, Upaya, Pajak Daerah*

ABSTRACT

The objective of research was to find out the constraints with the collection of regency or municipal tax and the attempt of improving the taxpayers' awareness of paying tax in Surakarta city as the enrichment of taxing course teaching material in Accounting Education Study Program of Teacher Training and Education Faculty of UNS.

This study was a descriptive qualitative research. The sampling technique used was purposive sampling one. The sample taken was not emphasized on number but on information richness the members of sample have as data source. Techniques of collecting data used were interview, observation and documentation. Data validation

was carried out using source and method triangulations. Technique of analyzing data used was qualitative technique with interactive model of analysis.

Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. (1) Local tax collection system in Surakarta city employed Self Assessment System and Office Assessment System. (2) The constraints with the collection of regency or municipal tax included limited human resource and taxpayers' low awareness of paying local tax. (3) The attempts taken by Income, Financial, and Asset Management Service (DPPKA) of Surakarta to improve the taxpayers' awareness of paying tax were to educate the taxpayers concerning local tax and to make socialization directly by inviting the taxpayers to come to Income, Financial, and Asset Management Service (DPPKA) to give them understanding related to local tax. (4) There was no teaching material about attempts and constraints in taxing course taught in Accounting Education Study Program.

Keywords: *Constraints, Attempt, Local Tax*

PENDAHULUAN

Sektor pajak dianggap cukup potensial sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari kemampuan bangsa sendiri tanpa harus menguntungkan diri dari pinjaman negara lain, sehingga kesadaran warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sangat diperlukan. Kesadaran warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan salah satu permasalahan yang akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai yang dikatakan menurut Suyatno (1997:60) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Undang-Undang atau Peraturan-peraturan perpajakan.
2. Prasarana untuk melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan perpajakan.
3. Kesadaran dari masyarakat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Setiap warga negara di Indonesia wajib pajak mengetahui akan pengetahuan pajak itu sendiri karena sebagai wajib pajak nantinya pajak merupakan iuran wajib kepada negara dengan balas jasa secara tidak langsung. Pengetahuan dan kesadaran akan pajak yang berkembang dimasyarakat masih minim. Namun kewajiban dalam membayar pajak kepada pemerintah masih saja diabaikan oleh warga negara yaitu dengan adanya usaha perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh warga negara terhadap pajak.

Sistem pemungutan pajak berkembang sekarang ini adalah dengan menggunakan *Self assessment System* yaitu wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang atau yang dibayarkan.

Sistem pemungutan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggungjawab warga negara yang baik. Setiap warga negara diharapkan ikut serta mendukung tercapainya program pemerintah dalam rangka pembangunan daerah untuk kesejahteraan bersama. Namun di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta sistem pemungutan pajaknya menggunakan *Self Assessment System* pajak terutang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan menggunakan *Office Assessment System* pajak terutang yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau berdasarkan ketetapan Walikota. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus mampu memahami baik Undang-undang, peraturan, maupun hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik dan taat membayar pajak. Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang

dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (1997: 51) "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut". Sedangkan menurut Kaho (1998:129) bahwa "Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai badan publik".

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP). Dengan adanya potensi pajak daerah yang dipungut diharapkan pemerintah Kota Surakarta mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada dengan melakukan pemungutan pajak dari masyarakat.

Kendala pemungutan pajak kabupaten atau kota dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan,

misalnya tentang bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), apa hak dan kewajiban setelah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, bagaimana mengisi Surat Pemberitahuan, bagaimana menghitung pajak yang harus dibayarkan dan lain-lain. Penyuluhan-penyuluhan perpajakan tersebut ditujukan kepada aparat perpajakan sebagai salah satu upaya untuk melayani wajib pajak.

Perpajakan merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Dalam pembelajaran mata kuliah perpajakan ini diharapkan mahasiswa menyadari akan pentingnya membayar pajak dan mempelajari lebih dalam lagi tentang mata kuliah perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang perpajakan dan bagi masyarakat sangat penting untuk mengetahui tentang pajak khususnya pajak daerah supaya dalam kehidupan bermasyarakat nantinya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kendala pemungutan pajak kabupaten/kota dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Surakarta (sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah

perpajakan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian berbentuk kualitatif ini dimaksudkan bahwa peneliti yang dilakukan tidak menggambarkan angka atau jumlah pengukuran atau jumlah yang memiliki perbandingan, namun merupakan keterangan atau konsep dan tanggapan atau respon yang berhubungan dengan obyek. Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan Kendala Pengumpulan Pajak Kabupaten Atau Kota dan Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Surakarta (sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah perpajakan pada Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS).

Data tidak akan diperoleh tanpa adanya sumber data. Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan

bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh peneliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini bersumber dari informan, peristiwa dan dokumen.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), yaitu sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan lebih ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada data yang diperoleh. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat pengambilan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Herdiyansyah (2010:143) mengatakan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga bentuk wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, teknik wawancara

yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur karena dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka supaya informan dapat mengungkapkan informasi atau memberikan jawaban secara bebas tanpa adanya tekanan.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan untuk menjaga validitas data yang dikumpulkan adalah dengan teknik triangulasi yaitu trianggualsi sumber dan trianggulasi metode. Triangulasi sumber adalah pengumpulan data sejenis dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama, sedangkan trianggulasi metode adalah pengumpulan data sejenis tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat komponen utama dalam menganalisis data yaitu :

1. Pengumpulan data, 2. Reduksi Data,
3. Penyajian data, 4. Menganalisis Data,
5. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya sesuai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011.

Mekanisme pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai daerah dan pembangunan daerah.

Mekanisme pembayaran pajak daerah di *Customer Service Operational* (CSO) dengan cara wajib pajak datang langsung ke ruang *Costomer Service Operational* (CSO) dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang akan disetorkan lalu petugas *Customer Service Operational* (CSO) meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah dilaporkan oleh wajib pajak yang berkenaan dengan pajak yang harus dibayarkan di Bank Jateng yang ada di Kas Daerah Kota Surakarta. Apabila wajib pajak ingin melakukan pembayaran atau menyetor pajak daerah maka wajib pajak harus menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), dan formulir penyetoran dari Bank Jateng.

Pelaksanaan pemungutan pajak tersebut adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah guna

mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan dilima Unit Peyanan Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan yang ada di Kota Surakarta dan disetiap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan terdapat petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sistem pemungutan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di indonesia yaitu menggunakan sistem *Offisial Assesment System* sistem ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam hal belum semua wajib pajak/retribusi terjaring pada pendaftaran yang dilakukan, maka DPPKA berperan aktif dalam mendaftar wajib pajak/wajib retribusi yang belum mendaftar dan *self assesment system* yang mana didalam kegiatan pendaftaran dan pendataan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

dalam pemungutan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Surakarta dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan dibantu oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk menangani pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut. Akan tetapi, kenyataan jumlah sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dirasa jumlahnya masih kurang. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih kurang maksimal atau optimal.

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke pada daerah mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas daerah. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dipengaruhi oleh banyak hal. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Upaya yang dilakukan DPPKA Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada masyarakat, agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak sudah mengetahui tentang pajak daerah, dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan DPPKA Kota Surakarta menggunakan berbagai media agar masyarakat mudah dalam memahaminya, antara lain dengan menggunakan media cetak berupa pamflet, media elektronik berupa talkshow yang ditayangkan di televisi yaitu TATV, dan sosialisasi secara langsung dengan mengundang masyarakat ke DPPKA Kota Surakarta atau petugas mendatangi ke UPTD yang ada di kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait dengan pentingnya pajak daerah. Melihat pentingnya pajak daerah, maka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus diperhatikan. Dengan lancar dan tertibnya masyarakat membayar pajak, diharapkan pembangunan di daerah akan berlangsung dengan baik dan lancar. Namun kenyataannya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak masyarakat yang belum taat dan patuh untuk membayar pajak daerah.

Dalam materi perpajakan tersebut sudah membahas mengenai materi tentang sistem pemungutan pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kota Surakarta dalam proses pemungutan pajak sudah menggunakan sistem *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Namun, dalam materi perpajakan belum diajarkan tentang materi yang membahas mengenai kendala pemungutan pajak dan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Surakarta. Materi ini bisa di jadikan sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah perpajakan di Prodi Pendidikan akuntansi. Materi ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan materi perpajakan khususnya pada pajak daerah agar nantinya mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan supaya nantinya mahasiswa tersebut menjadi wajib pajak yang taat pajak. Diharapkan mahasiswa mengetahui akan pentingnya membayar pajak karena dengan menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak akan sangat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta menggunakan sistem *Official Assesment System* sistem ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam hal belum semua wajib pajak/retribusi terjaring pada pendaftaran yang dilakukan, maka DPPKA berperan aktif dalam mendaftar wajib pajak/wajib retribusi yang belum mendaftar dan *self assesment system* yang mana didalam kegiatan pendaftaran dan pendataan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menangani proses pemungutan pajak daerah tersebut. Akan tetapi, kenyataan jumlah sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta masih terbatas dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak daerah salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi tentang pajak.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada masyarakat, agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak sudah mengetahui tentang pajak daerah, dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan DPPKA Kota Surakarta menggunakan berbagai media agar masyarakat mudah dalam memahaminya, antara lain dengan menggunakan media cetak berupa pamflet, media elektronik berupa talkshow yang ditayangkan di televisi yaitu TATV, dan sosialisasi secara langsung dengan mengundang masyarakat ke DPPKA Kota Surakarta atau petugas mendatangi ke kecamatan, kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait dengan pentingnya pajak daerah.

Materi perpajakan belum diajarkan tentang materi yang membahas mengenai kendala pemungutan pajak dan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Surakarta. Materi ini bisa di jadikan sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah perpajakan di Prodi Pendidikan akuntansi. Materi ini juga dapat

dijadikan sebagai tambahan pengetahuan materi perpajakan khususnya pada pajak daerah agar nantinya mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan supaya nantinya mahasiswa tersebut menjadi wajib pajak yang taat pajak.

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat diuraikan implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Implikasi secara teoritis yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pemungutan pajak kabupaten atau kota yang disebabkan oleh kesadaran wajib pajak dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya yang menyangkut tentang perpajakan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Simpulan penelitian ini juga berimplikasi secara praktis yaitu Berdasarkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta harus melakukan sosialisasi secara lebih intensif dan penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah Perpajakan di Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Sebagai bahan pengayaan mata kuliah perpajakan.

Untuk mendukung implikasi praktis tersebut maka, dapat diungkapkan saran bagi pihak-pihak terkait antara lain bagi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, sebagai bahan masukan untuk terus melaksanakan bahkan meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan, baik itu melalui forum-forum penyuluhan, selebaran, pamflet, papan pengumuman, maupun penjelasan langsung kepada Wajib Pajak pada saat datang ke DPPKA Kota Surakarta.

Bagi wajib pajak, berpartisipasi aktif untuk mengetahui/mencari tahu tentang informasi (peraturan) perpajakan yang terbaru, baik itu dengan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, membaca maupun mendengarkan informasi tentang perpajakan melalui berbagai media yang ada.

Bagi instansi pendidikan di UNS, manfaat bagi dosen mata kuliah perpajakan di prodi Pendidikan Akuntansi sebagai pengembangan bahan ajar untuk memperdalam mata kuliah tersebut bagi mahasiswa prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Sebagai bahan pengembangan materi yang diajar dan dosen diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dan komunikatif dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan mahasiswa tersebut akan lebih mudah memahami materi pembelajaran perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiyansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Kaho, J.R. (1988). *Prospek Otonomi Daerah di Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyatno. (1997). *Hukum Pajak*. Surakarta: UNS Pers.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

PENGESAHAN

Artikel ini telah dibaca dan direkomendasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II.

Surakarta, Januari 2016

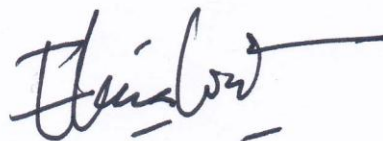
Pembimbing 1,



Prof. Dr. Siswandari, M. Stats

NIP. 19590201 198503 2 002

Pembimbing 2



Elvia Ivada, S.E, M.Si, Ak

NIP. 19740728 200812 2 001